

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1984.

Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Bandung, 1997.

Desna Aromatica, *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Kajian tentang Kelembagaan*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2021.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Galang Asmara, *Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kemal Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya: Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000.

Mansyur Achmad KM., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Pers, Malang, 2014.

Muhammad Mu'iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2020.

_____, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

Muhammad Sadi Is, Kun Budiono, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Ridwar HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

B. Jurnal, Tesis, dan Skripsi

Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, Vol. 01: 2, Juli 2022.

Febri Israndi, "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

di Kabupaten Agam”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2021.

Habib Solihin, “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2020.

Harisnawati, Sri Rahayu, Intan Sri Wahyuni, “Eksistensi Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah”, *Jurnal Bakaba*, Vol. 7: 2, Juli-Desember 2018.

Hendrikus Deo Peso, Edi Pranoto, “Fungsi Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Juristic*, Vol. 03: 1, April 2022.

Marcella J. Kapojos , Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudhi, “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 10: 1, Januari-Maret 2022.

Muslimah Hayati, “Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9:1, Februari 2021.

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, “Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13:2, Desember 2019.

Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, Muhammad Khoirul Anwar, “Upaya Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1: 1, Februari 2023.

Rury Mutia Dewi, “Pengawasan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi



di Desa Sukaramai Kecamatan Sei. Balai Kabupaten Batu Bara)”,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 2: 2, Februari 2022.

Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1: 2, Mei 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

D. Internet

Agung Nugraha, “Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI”, melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri> [26/03/2021].

Edward Silaban, “Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa”, melalui <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa> [17/02/2023].

Haneda Sri Lastoto, “Kedudukan Ombudsman Perwakilan”, melalui <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kedudukan-ombudsman-perwakilan> [05/04/18].

<https://masjidraya.sumbarprov.go.id/galeri/read/84-dubalang-.html>

<https://metroterkini.com/news/detail/51686/regional/nondaerah/lima-puluh-kota-marak-pemecatan-perangkat-nagari> [07/02/21].

<https://metroterkini.com/news/detail/51928/regional/nondaerah/camat-dan-wali-nagari-pangkalan-tumbalkan-kepala-jorong> [23/02/21].

<https://ppid.nagaribaringin.web.id/profile/tugas-fungsi-nagari/>

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/09/223721578/mengapa-desa-di-sumatera-barat-disebut-nagari?page=all> [09/08/2023].

<https://reportaseinvestigasi.com/pemberhentian-wali-jorong-nagari-pangkalan-tuai-polemik/> [12/10/20].

<https://reportaseinvestigasi.com/diberhentikan-dari-jabatan-wali-jorong-nagari-tigo-balai-pangkalan-lapor-ombudsman/> [20/10/20].

D. Lain-Lain

Laporan Akhir Hasil Analisis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mengenai Pencegahan Maladministrasi dalam Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Nomor Registrasi: 0295/LM/X/2020/PDG mengenai Dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur oleh Camat Pangkalan Koto Baru dalam Mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Saudari Hasni sebagai Kepala Jorong Tigo Balai dan Dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur oleh Wali Nagari Pangkalan dalam Penerbitan Surat Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Pangkalan a.n Saudari Hasni sebagai Kepala Jorong Tigo Balai.

Wawancara dengan Adel Wahidi, S.EI., M.H. Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Perwakilan Sumatera Barat [28/08/2024].

Wawancara dengan Rendra Catur Putra, S.H., M.H. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi (PVL) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat [28/08/2024].